

Judul : Pengiriman TKI ke Malaysia Dibuka Lagi Mulai 1 Agustus
Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 5

Pengiriman TKI ke Malaysia Dibuka Lagi Mulai 1 Agustus

JAKARTA – Pemerintah Indonesia mencabut kebijakan moratorium atau penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022. “Ya, per 1 Agustus dibuka lagi karena sudah ada *good will* dan komitmen dari pihak Malaysia,” kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menantarapengiriman TKI ke Malaysia, termasuk ribuan orang yang direkrut untuk sektor perkebunan sejak 13 Juli 2022. Indonesia menganggap ada pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang ditan-datangi kedua negara.

Duta Besar untuk Malaysia Hermono mengatakan, moratorium pengiriman TKI diberlakukan karena otoritas Imigrasi Malaysia masih menggunakan sistem perekrutan *online* untuk pekerja rumah tangga (PRT). Padahal, cara ini rentan dengan praktik perdagangan manusia dan kerja paksa.

Pengoperasian sistem ini, kata dia, melanggar perjanjian yang ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia pada April 2022. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan meningkatkan perlindungan bagi PRT. Menurut Hermono, perusahaan Malaysia telah mengajukan sekitar 20.000 aplikasi untuk merekrut pekerja. Setengahnya untuk di-

pekerjaan di sektor perkebunan dan manufaktur.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay sebelumnya mendukung kebijakan pemerintah yang bersikap tegas kepada Malaysia terkait pelanggaran kesepakatan dengan melakukan penghentian atau moratorium penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI ke negeri jiran tersebut.

Menurutnya, alasan yang disampaikan pemerintah didasarkan pada aspek perlindungan terhadap PMI. “*Kan* sudah ada MoU. Dalam penilaian saya itu, sangat kuat. Sebab, ditandatangani di depan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia. Semestinya, sejak ada penandatanganan MoU itu, proses penempatan PMI sudah tidak lagi pakai cara lama,” ujar Saleh.

Dia berpendapat, moratorium bisa bersifat kontraproduktif jika tidak ditangani dengan baik. Sebab, merujuk pada moratorium yang dilakukan kepada negara-negara Timur Tengah, PMI akhirnya tetap berangkat secara informal dan nonprosedural. “Saya mendapat informasi, jumlahnya sangat banyak. Artinya, moratorium itu tidak memperbaiki keadaan sebagaimana yang diinginkan. Justru, ada masalah baru, di mana perlindungan PMI semakin tidak tertangani karena tidak terpantau,” katanya.

□ **widyamichella**